

2016

# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah

BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang aman atas rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan dapat kami selesaikan. Semoga dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Balikpapan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memerlukan informasi dari berbagai pihak terkait yang didukung oleh data-data serta kerjasama yang baik, namun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan ini kami sadar bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan, maka saran dan pendapat dari semua pihak yang terkait sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang akan datang.

Balikpapan, Februari 2017

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN



Drs. **ELVIN JUNAIDI, M. Si**

Pembina Tk. I

Nip. 19700129 199003 1 006

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
1.1.2 Fungsi .....	1
1.1.3 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Isu-Isu Strategis Organisasi .....	4
1.3 Sumber Daya SKPD .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.1.1 Visi .....	6
2.1.2 Misi .....	7
2.1.3 Tujuan dan Sasaran .....	7
2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	7
2.1.5 Penetapan Kinerja Tahun 2016 .....	9
2.1.6 Strategi dan Kebijakan .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi .....	14
3.3 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan .....	21
3.4 Capaian Prestasi dan Penghargaan .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	24
4.2 Tindak Lanjut .....	24
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b> .....	26

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan LKjIP BPMP2T Kota Balikpapan Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, BPMP2T Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016. Visi BPMP2T Kota Balikpapan adalah “**Terwujudnya Pelayanan Perizinan Prima Menuju Iklim Investasi Yang Kondusif**” dan sesuai dengan visi tersebut maka misi BPMP2T Kota Balikpapan adalah:

Sesuai dengan visi tersebut, maka misi BPMP2T Kota Balikpapan adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan .

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan yang prima dengan mengutamakan responsivitas, akuntabilitas, transparan dan kredibel;
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, investasi dan kerjasama investasi.
3. Mewujudkan tertib administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perkantoran.

Secara umum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2016 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 3 ( Tiga ) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 9 indikator pada tahun 2016 rata-rata mencapai 96,39 % yang berarti tercapai dengan **baik**.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN UMUM BPMP2T KOTA BALIKPAPAN**

#### **1.1.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu Kota Balikpapan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan serta Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

#### **1.1.2 FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan adalah melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal peningkatan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi dan pelayanan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perizinan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan pengendalian;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

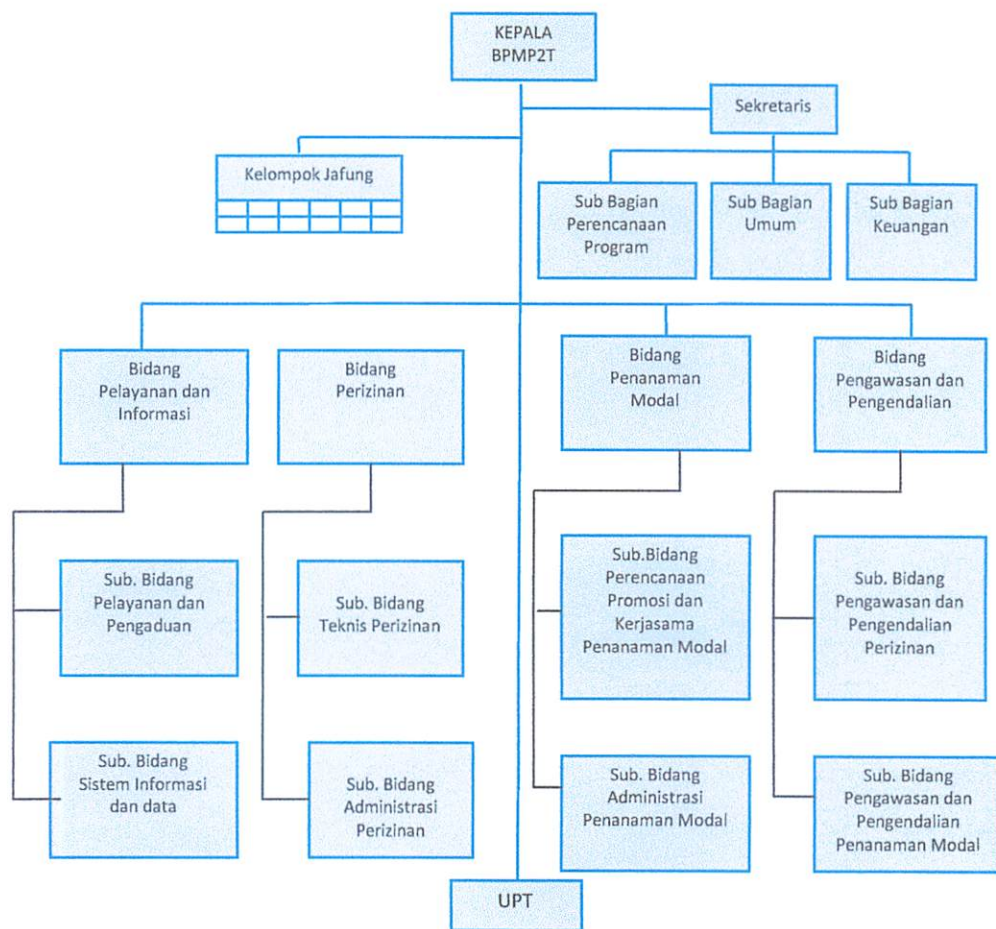
### **1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan pada saat ini mempunyai susunan organisasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2014 seperti berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahkan :
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Umum;
  - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahkan :
  - Sub Bidang Pelayanan dan Pengaduan;
  - Sub Bidang Sistem, Informasi dan Data.
4. Bidang Perizinan, membawahkan :
  - Sub Bidang Teknis Perizinan;

- Sub Bidang Admnistrasi Perizinan.
5. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
    - Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
    - Sub Bidang Administrasi Penanaman Modal.
  6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
    - Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
  7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### STRUKTUR ORGANISASI BPMP2T KOTA BALIKPAPAN



## **1.2 ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI**

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di kota Balikpapan. BPMP2T Kota Balikpapan dituntut dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, berkeadilan dan tepat waktu. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya SDM di BPMP2T Kota Balikpapan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan
4. Rendahnya tingkat kepatuhan perizinan dan penanaman modal
5. Belum maksimalnya sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi yang memadai dalam upaya mendukung proses pelayanan publik
6. Kurangnya koordinasi dengan SKPD teknis terkait.

## **1.3. Sumber Daya SKPD**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPMP2T Kota Balikpapan didukung oleh para pegawai yang berjumlah 87 orang dengan rincian 54 orang PNS dan 4 orang masih THL serta 29 orang Naban berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat



Pendidikan. Adapun susunan kepegawaian BPMP2T dapat dilihat sebagai berikut :

Jabatan	Golongan				Sub Total	Pendidikan						Sub Total
	IV	III	II	I		S-2	S-1	D3	SLTA	SLTP	SD	
Kepala Badan	1				1	1						1
Sekretaris Badan	1				1	1						1
Kepala Bidang	3	1			4	2	2					4
Kepala Sub Bagian		11			11		10		1			11
Staff		9	26	2	37	1	5	8	22	1	1	37
<b>Jumlah PNS</b>	5	21	26	2	<b><u>54</u></b>	5	17	8	23	1	1	<b><u>54</u></b>
<b>Jumlah THL/Naban</b>	-	-	-	-	<b><u>33</u></b>	1	3	3	22	4		<b><u>33</u></b>
<b>TOTAL SDM (PNS + THL/NABAN)</b>	<b>87 Orang</b>											

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Untuk Menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Tahun 2011-2016 dan tahun 2016 merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016.

##### **2.1.1 VISI**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, BPMP2T Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal memiliki visi sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN  
PERIZINAN PRIMA MENUJU IKLIM  
INVESTASI YANG KONDUSIF “**

### **2.1.2 MISI**

Misi merupakan cara untuk mencapai visi dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi dari BPMP2T Kota Balikpapan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan yang prima dengan mengutamakan responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, transparan dan kredibel;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, investasi dan kerjasama investasi.
- c. Mewujudkan tertib administrasi keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan perkantoran.

### **2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dengan EMPHATY kami memberikan pelayanan yang Tepat, Pasti dan Transparan.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap Investasi dan Perizinan.
3. Mengembangkan promosi potensi dan kerjasama Investasi Kota Balikpapan.
4. Meningkatkan Jumlah Realisasi Investasi
5. Meningkatkan administrasi keuangan, SDM dan perkantoran.

### **2.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di

lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut sumber data tergambar pada table berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Investasi</b>	Jumlah Investor	Banyaknya Investor di wilayah kota Balikpapan	Bidang Penanaman Modal
		Persentase Realisasi Investasi	Jumlah Investasi	Bidang Pengawasan dan pengendalian
		Frekuensi Promosi investasi	Jumlah Investasi	Bidang Penanaman modal
<b>2</b>	<b>Sistem Pelayanan berbasis IT</b>	Jumlah pemohon izin	Banyaknya pemohon izin	Bidang Perizinan
		Persentase Penyelesaian izin	Jumlah perizinan	Bidang perizinan
		Persentase Keluhan pembuatan izin		Bidang perizinan
		Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT		Bidang Pelayanan dan Informasi
<b>3</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	Persentase Realisasi Investasi	Jumlah Investasi	Bidang Pengawasan dan pengendalian

### 2.1.5 Penetapan Kinerja Tahun 2016

Dalam menjalankan rencana kerja tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan telah menetapkan target pencapaian kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

#### PENETAPAN KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Investasi	Jumlah Investor	90 unit usaha	<b>Program:</b> Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  <b>Kegiatan :</b> Peningkatan Iklim dan Kerjasama Investasi di bidang Penanaman Modal	193,698,000
		Jumlah persentase keluhan investor	0%	<b>Kegiatan :</b> 1. Update Website informasi dan pengaduan  2. Sistem Dokumentasi dan pengarsipan data elektronik	184,070,000  160,098,500
		Frekuensi Promosi Investasi	6 Kegiatan	<b>Program:</b>  Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi  <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Promosi Investasi	862,100,000
		Persentase Realisasi Investasi	90 Unit usaha	<b>Program :</b> Pengendalian dan Pengawasan Investasi  <b>Kegiatan :</b> Pengendalian dan pengawasan kegiatan Penanaman Modal dan Investasi di Kota Balikpapan	518,211,000

2	Sistem Pelayanan berbasis IT	Pelaksanaan SPIPISE	100%	Program: Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi Kegiatan : City Branding Kota Balikpapan	49,350,000
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah pemohon izin	8,500	Program : Pengembangan Pelayanan perizinan Kegiatan: Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	813,410,000
		Persentase penyelesaian izin	100%	Program : Pengembangan pelayanan Perizinan Kegiatan : Pengendalian dan evaluasi perijinan	76,032,500
		Persentase keluhan pembuatan izin	0%	Program : Pengembangan pelayanan Perizinan Kegiatan : Survey kepuasan konsumen	80,860,000
		Pengembangan Pelayanan Perizinan Berbasis IT	100%	Program : Pengembangan pelayanan Perizinan Kegiatan : 1. Pengembangan Pelayanan Perizinan 2. Penyediaan bahan/materi/media/informasi layanan perizinan dan Investasi	96,500,000 61,055,000

Jumlah anggaran keseluruhan setelah perubahan Tahun 2016 : Rp. 5.169.475.400,-  
Program : 10 Program

Penetapan Kinerja tahun 2016 ini diambil dari Rencana Kerja Tahunan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016. Penetapan Kinerja ini telah dilakukan *revisi* atau peninjauan kembali

pada Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

## **2.1.6 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **A. Strategi Kebijakan**

1. Mengkaji ulang perumusan kebijakan daerah menyangkut pelayanan publik dan menselaraskan dengan kondisi terkini.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan pada investor.
3. Meningkatkan pelayanan investasi dan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dunia usaha sehingga tercipta dunia usaha yang kompetitif.
5. Menyusun rencana penegakan disiplin aparatur, peningkatan etos dan budaya kerja.

### **B. Program**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7. Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah
8. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan
9. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016, ditetapkan 3 sasaran strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

Sasaran Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi;
2. Sistem pelayanan investasi berbasis IT;
3. Peningkatan Pelayanan perizinan;

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2016 mempunyai 9 (Sembilan ) indikator kinerja dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu kami disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :



No	Indikator kinerja	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD RENSTRA (2016)	Capaian s.d 2016 terhadap 2016 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/7)*100
1	Jumlah investor	124	90	134	149	90	149
2	Persentase realisasi investasi	100%	100%	100%	100	100%	100
3	Jumlah persentase keluhan investor	5%	0%	0.08%	0	0%	100
4	Frekuensi promosi investasi	7	6	4	67	25	16
5	Pelayanan SPIPISE	75%	100%	75%	75	100%	75
6	Jumlah Pemohon izin	8,742	8,500	11,066	130	8,500	130
7	Persentase penyelesaian izin	97.44%	100%	98%	98	100%	98
8	Persentase keluhan pembuatan izin	0.08%	0%	0.08%	0	0%	100
9	Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	80%	100%	100%	100	100%	100

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

#### Sasaran 1 : Peningkatan Investasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2015	Realisasi 2016
1	Jumlah investor	Investor	90	124	134
2	Persentase realisasi investasi	Persentase (%)	100	100	100
3	Jumlah persentase keluhan investor	Persentase (%)	0	5	0.08
4	Frekuensi promosi investasi	Kegiatan	6	7	4

#### Sasaran 2 : Sistem Pelayanan Berbasis IT

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2015	Realisasi 2016
5	Pelayanan SPIPISE	Persentase (%)	100	75	75

#### Sasaran 3 : Peningkatan Pelayanan Perizinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2015	Realisasi 2016
6	Jumlah Pemohon izin	Pemohon	8,500	8,742	11,066
7	Persentase penyelesaian izin	Persentase (%)	100	97.44	98
8	Persentase keluhan pembuatan izin	Persentase (%)	0	0.08%	0.08
9	Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	Persentase (%)	100	80	100

Indikator tersebut telah sesuai dengan Penetapan Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016.

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016 kami sajikan pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Sasaran 1 : Peningkatan Investasi</b>				
1	Jumlah investor	Investor	90	134	149
2	Persentase realisasi investasi	Persentase (%)	100%	100%	100
3	Jumlah persentase keluhan investor	Persentase (%)	0%	0.08%	100
4	Frekuensi promosi investasi	Kegiatan	25	4	16
	<b>Sasaran 2 : Sistem Pelayanan Berbasis IT</b>				
5	Pelayanan SPIPISE	Persentase (%)	100	75	75
	<b>Sasaran 3 : Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>				
6	Jumlah Pemohon izin	Pemohon	8,500	11,066	130
7	Persentase penyelesaian izin	Persentase (%)	100%	97.44	97
8	Persentase keluhan pembuatan izin	Persentase (%)	0%	0.08%	100
9	Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	Persentase (%)	100%	100	100
<b>Rata - rata Capaian Kinerja BPMP2T</b>					<b>96.39</b>

Jumlah Anggaran setelah perubahan Tahun 2016 : Rp. 5.169.475.400,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 : Rp. 4.473.493.731,00

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut.

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan telah berupaya melaksanakan amanat di bidang urusan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu .

Capaian sasaran strategis Badan Penanaman modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran 1 Peningkatan Investasi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian (%)
1	Jumlah investor	Investor	90	134	149
2	Persentase realisasi investasi	Persentase (%)	100%	100%	100
3	Jumlah persentase keluhan investor	Persentase (%)	0%	0.08	100
4	Frekuensi promosi investasi	Kegiatan	6	4	67
<b>Rata - rata Capaian Kinerja BPMP2T</b>					<b>103.89</b>

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yaitu yang pertama adalah cakupan Jumlah Investor dan jumlah Investasi. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagaimana tersaji dalam tabel di atas.

Sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan Perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Indikator sasaran peningkatan investasi terkait dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Dari jumlah investor yang ditargetkan 90 investor ,realisasinya adalah sebesar 134 investor melebihi target sebesar 149% dikarenakan kondusifnya Kota Balikpapan sehingga menarik Investor untuk berinvestasi di Balikpapan
2. Dari persentase realisasi Investasi yang ditargetkan sebesar 100% Tahun 2016, realisasinya adalah sebesar 100% dikarenakan meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Balikpapan.
3. Persentase target keluhan investor pada tahun 2016 sebesar 0 % ,realisasi adalah sebesar 100% dikarenakan terlaksananya prosen perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan peruntukan kegiatan pembangunan dan Perijinan di Kota Balikpapan.
4. Pada frekuensi promosi investasi yang ditargetkan sebesar 6 event promosi realisasi adalah sebesar 4 kali atau sebesar 67% di bidang

promosi karena terdapat adanya kebijakan pengurangan anggaran kegiatan di Kota Balikpapan.

### **Sasaran 2 Sistem Pelayanan Berbasis IT**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian (%)
5	Pelayanan SPIISE	Persentase (%)	100	75	75
<b>Rata - rata Capaian Kinerja BPMP2T</b>					<b>75.00</b>

5. Dari pelayanan SPIISE ditargetkan tahun 2016 sebesar 100% akan tetapi untuk tahun anggaran 2016 tidak ada kegiatan yang terkaper di pelaksanaan SPIISE, dan terdapat kendala teknis serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pelayanan SPIISE.

### **Sasaran 3 Peningkatan Pelayanan Perizinan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian
6	Jumlah Pemohon izin	Pemohon	8,500	11,066	130
7	Persentase penyelesaian izin	Persentase (%)	100%	97.44	97
8	Persentase keluhan pembuatan izin	Persentase (%)	0%	0.08%	100
9	Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	Persentase (%)	100%	100	100
<b>Rata - rata Capaian Kinerja BPMP2T</b>					<b>106.91</b>

Peningkatan pelayanan perizinan merupakan bentuk tanggungjawab Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Balikpapan dalam melayani masyarakat, salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Kegiatan Survey kepuasan konsumen.

Indikator sasaran peningkatan investasi terkait dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Dari jumlah permohonan izin yang ditargetkan sebanyak 8.500 pemohon realisasinya sampai akhir Desember 2016 adalah sebesar 11.066 pemohon atau 130% jika disamping izin yang berakhir masa berlakunya terdapat pula pemohon baru terkait adanya investasi di Balikpapan dibidang perdagangan dan jasa serta ditetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai instansi pengurusan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Balikpapan.
2. Dari persentase penyelesaian izin yang ditargetkan sebesar 100 %,realisasi pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 97% dikarenakan adanya komitmen dan langkah kongkret dalam melaksanakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) yang telah dibuat namun tidak dapat tercapai secara penuh dikarenakan dokumen yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap serta terdapat pengajuan izin terutama IMB yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota sehingga proses tidak dapat dilanjutkan.
3. Persentase keluhan pembuatan izin pada tahun 2016 yaitu 0% untuk realisasi keluhan pembuatan izin sebesar 100% dikarenakan terjadi penurunan keluhan dari pemohon izin karena meningkatnya tingkat kepuasan dalam pelayanan perizinan yang diupayakan melalui pelayanan

kepada masyarakat oleh petugas-petugas terkait, melalui pelatihan-pelatihan serta meningkatkan etos kerja pelayanan publik.

4. Pada pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% realisasi dari pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT sebesar 100% dikarenakan pengembangan yang masih terus dilakukan dalam membangun aplikasi menyesuaikan dengan standar Operasional Pelayanan seiring dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang investasi dan teknologi (IT), penggunaan aplikasi online sehingga mempermudah proses pengecekan berkas yang di ajukan serta adanya keterbukaan informasi (transparansi) mengenai perizinan lewat website yang dapat di akses dengan mudah oleh semua orang.

**Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Investasi	91.22	85.63	93.87
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	75.00	89.18	118.90
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	95.07	85.43	89.86

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penyerapan anggaran yang cukup baik dapat mendukung tercapainya Capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016, Walaupun telah dilakukan kebijakan rasionalisasi



pada Anggaran Tahun 2016 namun capaian tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tergolong baik.

### C. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belanja barang dan jasa yang mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

Pada tahun 2016 secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.837.893.914,00 dari total Rp 5.434.606.000,00 atau mencapai 89,02%, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.169.475.400,00 dan terealisasi mencapai 86,54% atau sebesar Rp. 4.473.493.731,00

Pada tabel berikut disajikan capaian akuntabilitas keuangan per Sasaran Strategis pada tahun 2016 digambarkan pada tabel berikut:

#### **CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Investasi	1,918,177,500	1,642,475,855	85.63
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	49,350,000	44,008,150	89.18

pada Anggaran Tahun 2016 namun capaian tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tergolong baik.

### 3.3 Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belanja barang dan jasa yang mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

Pada tahun 2016 secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.837.893.914,00 dari total Rp 5.434.606.000,00 atau mencapai 89,02%, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebesar Rp. 5.169.475.400,00 dan terealisasi mencapai 86,54% atau sebesar Rp. 4.473.493.731,00

Pada tabel berikut disajikan capaian akuntabilitas keuangan per Sasaran Strategis pada tahun 2016 digambarkan pada tabel berikut:

#### **CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Investasi	1,918,177,500	1,642,475,855	85.63
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	49,350,000	44,008,150	89.18

3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	1,127,857,000	963,532,985	85.43
<b>Total</b>		<b>3,095,384,500</b>	<b>2,650,016,990</b>	<b>85.61</b>

Tidak terealisasinya keseluruhan anggaran dikarenakan oleh terdapat selisih harga atau biaya untuk belanja barang dan jasa akibat proses pengadaan.

Untuk memaksimalkan hasil dalam proses kegiatan maka untuk tahun yang akan datang perlu adanya perencanaan yang matang, sehingga seluruh kegiatan yang penggunaannya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dapat diselenggarakan dengan baik.

### 3.4 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2016 mendapatkan beberapa prestasi dan penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada bulan Januari 2016 mendapat Zona Hijau Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap UU No:25/2009 tahun penelitian 2015 untuk 5 jenis pelayanan
2. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur Predikat I tentang Panji-panji Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur Predikat I tentang Panji-panji Bidang Daya Saing Daerah.

Untuk hasil prestasi dan penghargaan tahun 2016 agar dapat mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Tabel Prestasi dan Penghargaan  
Tahun 2016**

NO	TAHUN PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	PENGHARGAAN DARI
1	2016	Zona Hijau Predikat kepatuhan Tinggi Terhadap UUNo.25/2009 untuk 5 (lima) jenis pelayanan yang diselenggarakan	Ombudsman Republik Indonesia
2	2016	Peringkat I Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gubernur Kalimantan Timur
3	2016	Peringkat I Tentang Daya Saing Daerah	Gubernur Kalimantan Timur

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2016 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 9 (Sembilan) Indikator pada tahun 2016 rata-rata mencapai **96,39%** yang berarti tercapai dengan baik.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **85,61%** dari total Anggaran Belanja Langsung.

Sedangkan target yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Ada beberapa kegiatan yang pada tahun 2016 terjadi penurunan seperti frekuensi event promosi dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk promosi nasional dan internasional .
2. Persentase Pelayanan SPIPSE tidak mencapai target 100% dikarenakan adanya kendala teknis pada aplikasi SPIPSE dan kurangnya Sumber Daya Manusia.

### **4.2 Tindak lanjut**

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
4. Perlu ditetapkan adanya Formulasi dari target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja .
5. Peningkatan SDM Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab melalui bimbingan teknis;
6. Pemutakhiran dan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Zona Integritas yaitu OPD yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
2. IDIKATOR KINERJA UTAMA



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELVIN JUNAIDI**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

**H. M. RIZAL EFFENDI**

Balikpapan, 15 Januari 2016

Pihak Pertama

**ELVIN JUNAIDI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
BPMP2T KOTA BALIKPAPAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Investasi	- Jumlah Investor - Persentase Realisasi Investasi - Persentase Keluhan Investor - Frekwensi Promosi Investasi - Pelayanan SPIPISE	100 100% 5% 6 kali 75%
2	Peningkatan Pelayanan Perizinan	- Jumlah Permohon Izin - Persentase Penyelesaian Izin - Persentase Keluhan Pembuatan Izin - Pengembangan pelayanan Perizinan berbasis IT	8.500 100% 0,18% 95%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 2,584,250,000.00	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 633,391,000.00	
Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Rp 1,553,101,250.00	
Program Pengendalian dan pengawasan Investasi	Rp 185,726,000.00	



**KEPALA BPMP2T  
KOTA BALIKPAPAN**  
  
**Dr. ELVIN JUNAIDI, M.Si**  
 NIP. 19700129 199003 1 006

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT ORGANISASI : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan

TUGAS : Melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang di delegasikan secara terpadu

INDIKATOR KINERJA UTAMA : Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan Investasi	Jumlah investor Persentase realisasi investasi Jumlah persentase keluhan investor Frekuensi promosi investasi	Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal
2	Sistem Pelayanan Investasi Berbasis IT	Pelayanan SPIPISE	Bidang Penanaman Modal
3	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pemohon izin Persentase penyelesaian izin Persentase keluhan pembuatan izin Pengembangan pelayanan perizinan berbasis IT	Bidang Perizinan Bidang Perizinan Bidang Perizinan Bidang Perizinan

Balikpapan, 7 Januari 2016

**KEPALA BPMP2T**



**Drs. ELVIN JUNAIDI, M.Si**  
NIP. 19700129 199003 1 006